

PERAN TEKNOLOGI KEUANGAN (FINTECH) DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Grace Yulianti¹, Mohammad Chaidir², A. Sigit Pramono³
STIE Kasih Bangsa, Indonesia¹²³

E-Mail: grace@stiekasihbangsa.ac.id

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v4i4.649](https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.649)

Abstract

This research examines the important role of financial technology (fintech) in Indonesia's economic development and growth. The development of digital technology in Indonesia shows significant progress, with the number of internet users reaching 210 million in 2022. This study uses a descriptive qualitative approach with a comprehensive literature study method, analyzing documents and publications from government institutions and leading research. The research results show that the fintech sector has contributed significantly to Indonesia's digital economy, with transaction value reaching USD77 billion in 2022 and projected growth of up to USD130 billion in 2025. The presence of more than 2,300 startups, including one decacorn and several unicorns, shows the great potential of this industry. However, there are still challenges, such as gaps in digital access between urban and rural areas, with 12,548 villages needing internet access. This research concludes that fintech development requires a comprehensive regulatory framework and stakeholder collaboration to support financial inclusion and sustainable economic growth in Indonesia.

Keywords: *financial technology, digital economy, financial inclusion*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran penting teknologi keuangan (fintech) dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan teknologi digital di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dengan jumlah pengguna internet mencapai 210 juta pada tahun 2022[1]. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur komprehensif, menganalisis dokumen dan publikasi dari lembaga pemerintah serta riset terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor fintech telah berkontribusi signifikan terhadap ekonomi digital Indonesia dengan nilai transaksi mencapai USD77 miliar pada 2022 dan proyeksi pertumbuhan hingga USD130 miliar pada 2025. Kehadiran lebih dari 2.300 startup, termasuk satu decacorn dan beberapa unicorn, menunjukkan potensi besar industri ini[2]. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan 12.548 desa belum terjangkau internet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan fintech memerlukan kerangka regulasi komprehensif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: teknologi keuangan, ekonomi digital, inklusi keuangan

1. Pendahuluan

Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi digital, ditandai dengan pencapaian-pencapaian yang signifikan di berbagai sektor. Jumlah pengguna internet di Indonesia telah meningkat secara dramatis mencapai 210 juta pengguna pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sangat mengesankan dengan kenaikan sebesar 52% pada tahun 2021, mencapai nilai total 53 miliar dolar AS (Reskiyah, 2023). Kemajuan ini juga tercermin dari naiknya peringkat Indonesia sebanyak 11 posisi dalam World Digital Competitiveness Ranking, dari posisi 56 pada tahun 2019 menjadi peringkat 45 pada tahun 2023.

Ekosistem startup di Indonesia juga berkembang pesat dengan lebih dari 2.000 startup, termasuk 15 unicorn dan 2 decacorn yang telah mendunia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Proyeksi ke depan menunjukkan potensi yang lebih besar lagi, dimana ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan tumbuh empat kali lipat pada tahun 2030, mencapai kisaran 210-360 miliar dolar AS. Perkembangan ini didukung oleh penetrasi perangkat mobile yang tinggi, dengan jumlah pengguna ponsel mencapai 354 juta unit, melebihi total populasi Indonesia yang berjumlah 280 juta jiwa (Setkab.go.id, 2023).

Transformasi sektor keuangan di Indonesia tengah mengalami perubahan fundamental yang didorong oleh pesatnya perkembangan inovasi teknologi. Era digitalisasi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengakses layanan keuangan, dari yang sebelumnya berbasis konvensional menjadi lebih modern dan efisien. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada level infrastruktur, tetapi juga pada pola perilaku konsumen yang semakin menuntut kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam layanan keuangan. Hadirnya berbagai platform fintech seperti dompet digital, pembayaran elektronik, dan layanan pinjaman online telah menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan dinamis. Transformasi ini juga didukung oleh penetrasi smartphone yang tinggi dan meningkatnya literasi digital masyarakat Indonesia. Sektor perbankan tradisional pun mulai beradaptasi dengan mengembangkan layanan digital mereka, menciptakan sinergi antara sistem konvensional dan teknologi modern. Perkembangan ini menjadi katalis penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, sekaligus membuka peluang baru bagi inovasi dan perkembangan sektor keuangan yang lebih maju.

Modernisasi sistem keuangan dalam era digital menjadi sangat mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks globalisasi yang semakin intens, perusahaan dan institusi keuangan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan *blockchain*, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, meningkatkan akurasi data, serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi (Surachman, *et al*, 2024).

Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk keuangan. Banyak institusi yang terpaksa bertransformasi untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Misalnya, aplikasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Indonesia telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara kementerian (Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses perencanaan hingga pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Urgensi modernisasi ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi tantangan baru, seperti meningkatnya ancaman keamanan siber dan perlunya pemenuhan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam sistem keuangan tidak hanya sekadar pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing di masa depan.

Kesenjangan akses layanan keuangan di Indonesia masih menjadi tantangan serius, dengan sekitar 70% masyarakat belum memperoleh akses kepada layanan keuangan secara resmi (Syaagatha, 2024). Situasi ini diperparah dengan adanya ketimpangan infrastruktur perbankan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dimana masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet (Kompaspedia, 2021). Sementara itu, sektor UMKM menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses layanan keuangan formal, dengan 74% UMKM belum mendapat akses kredit dari lembaga keuangan formal (Santoso, 2020). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta rumitnya persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

Fintech telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD77 miliar pada 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD130 miliar pada 2025 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023). Peran strategis fintech dalam mendukung inklusi keuangan terlihat dari peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat dan UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, dengan outstanding pembiayaan fintech P2P lending tumbuh 33,73% mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital, ditunjukkan dengan hadirnya 4 unicorn perusahaan fintech bernilai lebih dari \$1 miliar dan satu decacorn bernilai lebih dari \$10 miliar, serta proyeksi nilai fintech yang akan mencapai lebih dari \$100 miliar pada tahun 2025 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020).

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, ditandai dengan hadirnya sekitar 350 perusahaan fintech yang menyediakan berbagai layanan keuangan digital, mulai dari sistem pembayaran, pinjaman peer-to-peer, hingga securities crowdfunding. Dampaknya terhadap sektor ekonomi dan keuangan terlihat dari proyeksi kontribusi ekonomi digital yang akan mencapai Rp 2.167 triliun atau 10% dari total PDB pada tahun 2025 (Nandhika & Fitriyani, 2024). Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia, seperti POJK 77/POJK.01/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017, telah memberikan kerangka kerja yang jelas

bagi perusahaan fintech untuk beroperasi secara legal sambil melindungi konsumen. Meski demikian, industri fintech masih menghadapi tantangan seperti business continuity, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, serta pentingnya kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran teknologi finansial yang telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan akses masyarakat pada pembiayaan. Studi ini juga mengidentifikasi kontribusi fintech dalam mendorong inklusi keuangan yang ditargetkan. Lebih lanjut, evaluasi dampak fintech terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan estimasi nilai dan pertumbuhan tahunan. Dalam mengkaji prospek pengembangannya, fintech diproyeksikan akan terus berkembang dengan berbagai model bisnis baru seperti *digital capital raising*, *InsurTech*, dan *market provisioning*, didukung oleh lingkungan regulasi yang kondusif serta kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan dampak dari berbagai program dan inisiatif pemerintah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, laporan resmi, dan publikasi ilmiah terkait perkembangan teknologi keuangan di Indonesia. Sumber data mencakup laporan dari lembaga pemerintah, publikasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta studi dari lembaga riset terkemuka. Analisis dilakukan dengan mengkaji aspek pertumbuhan ekonomi digital, transformasi sektor keuangan, regulasi, dan tantangan dalam implementasi teknologi finansial di Indonesia

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi digital di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 221,56 juta orang pada tahun 2024, meningkat dari 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Tingkat penetrasi internet di Indonesia kini mencapai 78,19% dari total populasi yang berjumlah 275,77 juta jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).

Ekonomi digital Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan dengan nilai tertinggi di Asia Tenggara, mencapai USD 70 miliar pada tahun 2021. Sektor e-commerce menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 52% dan total nilai transaksi (GMV) mencapai USD 53 juta[5]. Pemerintah telah menyiapkan kerangka pengembangan ekonomi digital 2021-2030 untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Center for Indonesian Policy Studies, 2022)

Riset International Institute for Management Development World Digital Competitiveness Ranking (IMD WDCR) 2024 mengungkapkan peningkatan daya saing digital Indonesia ke posisi 43 dari 67 negara. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia menunjukkan tren positif dengan kenaikan peringkat dari posisi 56 (2020), 53 (2021), 51 (2022), 45 (2023), hingga 43 (2024). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia (skor 61,36) berada di bawah Singapura (peringkat 1, skor 100), Malaysia (peringkat 36, skor 65,5), dan Thailand (peringkat 37, skor 65,45), namun masih unggul dari Filipina (peringkat 61, skor 45,18). Indonesia mencatat prestasi dalam layanan perbankan dan finansial (peringkat 2), investasi telekomunikasi (peringkat 3), dan pemodal ventura untuk perusahaan teknologi (peringkat 5)[1]. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek kecepatan internet pita lebar (peringkat 66), jumlah pengguna internet (peringkat 64), pembajakan software (peringkat 63), pendidikan dan pelatihan teknologi (peringkat 63), serta publikasi riset AI di jurnal Scopus (peringkat 63) (Voi.id, 2024).

3.1. Transformasi Sektor Keuangan

3.1.1. Perubahan Fundamental

Sektor keuangan Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dengan digitalisasi layanan yang semakin masif. Nilai transaksi digital banking mencapai Rp15.148,71 triliun dengan pertumbuhan 12,83% year-on-year, sementara transaksi QRIS tumbuh pesat hingga 87,90% mencapai Rp56,92 triliun. Perubahan pola perilaku konsumen terlihat jelas dari menurunnya penggunaan kartu ATM, debit, dan kredit sebesar 4,94% menjadi Rp2.041,72 triliun, menandakan preferensi masyarakat yang beralih ke layanan perbankan digital yang lebih fleksibel. Transformasi ini diperkuat oleh penetrasi internet yang tinggi, dengan hampir 80% penduduk Indonesia telah terhubung internet pada 2024 (MNC Bank, 2023).

Penetrasi platform fintech semakin meluas dengan hadirnya 366 perusahaan fintech di Indonesia hingga akhir 2022. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya akses internet, penetrasi smartphone yang merata, dan keterbukaan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara terdepan di Asia Tenggara dalam industri fintech, menyumbang 20% dari total pemain korporasi fintech di kawasan ini (Neraca, 2024).

Model bisnis Banking as a Service (BaaS) menjadi tren yang semakin populer, memungkinkan perusahaan non-bank menyediakan layanan keuangan melalui infrastruktur bank berlisensi. Ditambah dengan inisiatif Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dari Bank Indonesia, integrasi sistem pembayaran antar platform menjadi lebih mudah, mendorong inovasi dalam layanan keuangan digital (MNC Bank, 2023).

3.1.2. Modernisasi Sistem

Implementasi sistem terintegrasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) menjadi tonggak penting dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara. SPAN mengintegrasikan seluruh proses dari hulu (penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan) dengan database terpusat yang memfasilitasi otomatisasi proses bisnis. Sistem ini terdiri dari enam modul utama yang mencakup Manajemen DIPA, Manajemen Komitmen, Pembayaran, Penerimaan, Manajemen Kas, serta Akuntansi dan Pelaporan. SPAN beroperasi secara online dengan single database yang membuat proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan (Anwar & Hadi, 2022).

Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam sistem keuangan. Hal ini mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih tangguh dan fleksibel untuk mengakomodasi transaksi digital yang meningkat pesat. Pemanfaatan big data, AI, dan blockchain semakin intensif untuk meningkatkan keamanan transaksi, deteksi fraud, dan pengambilan keputusan berbasis data. Modernisasi sistem ini didukung oleh tiga pilar utama yaitu penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan sistem teknologi informasi, dan tata kelola perubahan. Sistem ini juga menjadi acuan bagi berbagai negara lain dalam mengembangkan program serupa, bahkan pernah menjadi agenda pembahasan pada APEC.

3.2. Tantangan dan Kesenjangan

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 97,74 juta orang Indonesia atau setara 48% dari populasi penduduk dewasa masih belum memiliki rekening bank (*unbanked*) (Kompas, 2024). Kondisi ini mencerminkan masih besarnya tantangan dalam mewujudkan inklusi keuangan yang merata. Dari total 93.971 desa di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa yang belum mendapat akses internet memadai. Kesenjangan digital ini terutama terjadi di daerah terpencil dan wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, sehingga menghambat penetrasi layanan keuangan digital (Digital Mama, 2024).

Terdapat kesenjangan pembiayaan sektor UMKM yang sangat besar, mencapai Rp 1.290 triliun. Dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 2.740 triliun, perbankan baru mampu memenuhi 44% saja. Hal ini menjadi tantangan serius mengingat UMKM merupakan 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Indeks inklusi keuangan di perkotaan mencapai 78,41%, sementara di perdesaan hanya 70,13%. Kesenjangan ini memerlukan strategi khusus untuk pemerataan akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa (Jalin, 2024).

3.3. Kontribusi Fintech

3.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dengan mencatatkan nilai transaksi sebesar USD77 miliar pada tahun 2022, atau tumbuh 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia berhasil memposisikan diri sebagai pemain utama ekonomi digital di kawasan ASEAN dengan kontribusi mencapai 40% dari total transaksi digital regional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren yang sangat menjanjikan. Nilai valuasi sektor ini diperkirakan akan mencapai USD130 miliar pada tahun 2025, dan berpotensi tumbuh lebih besar lagi hingga mencapai USD220-USD360 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didukung oleh populasi usia produktif yang besar dan tingkat penetrasi internet yang telah mencapai 76,8%. Perkembangan ini juga didorong oleh ekosistem startup yang kuat, dimana Indonesia memiliki lebih dari 2.400 perusahaan startup yang menempatkannya di peringkat ke-6 dunia. Investasi di sektor ekonomi digital juga menunjukkan sinyal positif, tercatat deal value investasi mencapai USD3 miliar pada triwulan pertama 2022, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai investasi digital tertinggi kedua di ASEAN setelah Singapura (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

3.3.2. Perkembangan Industri

Industri digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan kehadiran lebih dari 2.300 startup yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara. Dari jumlah tersebut, Indonesia telah melahirkan satu decacorn yaitu GoTo (hasil merger Gojek dan Tokopedia) serta beberapa unicorn seperti Traveloka, Bukalapak, OVO, dan Blibli. Valuasi startup unicorn Indonesia menunjukkan angka yang impresif, dengan Bukalapak mencapai valuasi 7,5 miliar USD, OVO dengan 2,9 miliar USD, dan Traveloka dengan 2,75 miliar USD. Pertumbuhan ini didukung oleh ekosistem digital yang semakin matang dan kepercayaan investor global terhadap potensi pasar Indonesia (Bizhare, 2024).

Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 146 miliar USD pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan transaksi e-commerce

yang diperkirakan mencapai Rp533,5 triliun pada tahun 2023. Indonesia bahkan diproyeksikan akan menyumbang 40% dari total ekonomi digital ASEAN, yang diperkirakan mencapai 2 triliun USD pada tahun 2030 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

3.4. Aspek Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK 77/POJK.01/2016 telah menetapkan regulasi komprehensif tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting seperti pendaftaran dan perizinan, mitigasi risiko, tata kelola perusahaan, serta perlindungan pengguna layanan fintech. Bank Indonesia juga mengeluarkan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menjadi landasan hukum bagi inovasi keuangan digital. Peraturan ini mencakup kewajiban pendaftaran, sandbox regulatory, dan manajemen risiko bagi penyelenggara teknologi finansial, termasuk sistem pembayaran digital.

Kerangka kerja perlindungan konsumen dalam industri fintech mencakup lima aspek utama: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, dan penanganan pengaduan. Implementasinya meliputi kewajiban fintech untuk memiliki sistem pengamanan data yang handal, prosedur verifikasi yang ketat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Regulasi ini juga mewajibkan penyelenggara fintech untuk memiliki modal minimum, escrow account, dan virtual account terpisah untuk melindungi dana pengguna. Selain itu, ada pembatasan maksimal pinjaman, tingkat bunga, dan kewajiban transparansi informasi untuk melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

3.5. Prospek Pengembangan

Perkembangan model bisnis fintech di Indonesia menunjukkan diversifikasi yang signifikan. Dari yang awalnya hanya berfokus pada pembayaran dan pinjaman, kini telah berkembang mencakup digital *capital raising*, *InsurTech*, dan *market provisioning*. Inovasi ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor keuangan digital yang lebih inklusif. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan dampak transformasi digital. Pemerintah memberikan ruang bagi fintech untuk mendukung program pembangunan, sementara OJK berperan dalam pengawasan dan pengembangan model bisnis. Ekosistem yang terbangun melibatkan sinergi antara unit pengadaan pemerintah, UMKM, dan institusi perbankan dalam sistem yang terintegrasi.

Program dan inisiatif pemerintah semakin diperkuat melalui digitalisasi berbagai layanan keuangan. Hal ini terlihat dari pengembangan aplikasi SIKP Mobile untuk memudahkan akses pembiayaan UMKM dan implementasi Digipay yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam satu platform. Inisiatif ini didukung oleh regulatory sandbox yang memungkinkan inovasi keuangan digital berkembang dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

4. Kesimpulan

Teknologi finansial telah memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai USD77 miliar pada tahun 2022 dan proyeksi pertumbuhan hingga USD130 miliar pada tahun 2025. Kehadiran lebih dari 2.300 startup, termasuk satu decacorn dan beberapa unicorn, menunjukkan potensi besar industri ini. Meski demikian, masih terdapat tantangan signifikan seperti kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Kerangka regulasi yang komprehensif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran fintech untuk mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia

Referensi

Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2), 32-55.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). 221 juta penduduk Indonesia makin melek sama internet. [Indonesiabaik.id. https://indonesiabaik.id/infografis/221-juta-penduduk-indonesia-makin-melek-sama-internet](https://indonesiabaik.id/infografis/221-juta-penduduk-indonesia-makin-melek-sama-internet)

Bizhare. (2024). Daftar startup unicorn Indonesia beserta nilai valuasinya 2024. <https://www.bizhare.id/media/bisnis/daftar-startup-unicorn-indonesia>

Center for Indonesian Policy Studies. (2022). Potensi ekonomi digital 2022: Belajar dari pertumbuhan 2021. CIPS Indonesia. Retrieved from cips-indonesia.org

- Digital Mama. (2024, Oktober 7). Rural ICT Camp 2024: 13 persen desa di Indonesia belum terkoneksi internet. DigitalMama.id. <https://digitalmama.id/2024/10/rural-ict-camp-2024-13-persen-desa-di-indonesia-belum-terkoneksi-internet/>
- Jalin. (2024, September 30). Hasil SNLIK 2024: Masyarakat lebih melek finansial, akses keuangan masih perlu ditingkatkan. <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/hasil-snlik-2024-masyarakat-lebih-melek-finansial-akses-keuangan-masih-perlu-ditingkatkan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, 14 Desember). Teknologi digital bantu pengelolaan keuangan negara makin akuntabel dan berkualitas. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4022-teknologi-digital-bantu-pengelolaan-keuangan-negara-makin-akuntabel-dan-berkualitas.html>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Mendorong pertumbuhan fintech untuk perkuat ekonomi digital Indonesia. Indonesia.go.id.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, Agustus 1). Mengalami kemajuan pesat dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, Menko Airlangga: Adopsi teknologi digital Indonesia naik signifikan 11 peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking. Siaran Pers HM.4.6/272/SET.M.EKON.3/08/2024.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020, November 11). Pemerintah dorong fintech untuk tingkatkan inklusi keuangan dan transformasi digital. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023, Februari 28). Pemerintah dorong pemulihan ekonomi lebih cepat dengan optimalkan potensi ekonomi digital. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4957/pemerintah-dorong-pemulihan-ekonomi-lebih-cepat-dengan-optimalkan-potensi-ekonomi-digital>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023, Agustus 24). Ekonomi digital mesin pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5317/ekonomi-digital-mesin-pertumbuhan-ekonomi-nasional-ke-depan>
- Kompaspedia. (2021). Bank digital: Prospek dan tantangan di Indonesia. Kompas.id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/bank-digital-prospek-dan-tantangan-di-indonesia>
- Kompas. (2024, December 6). Pinjaman daring jalan ketiga menuju inklusi keuangan masyarakat. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/pinjaman-daring-jalan-ketiga-memenuhi-inklusi-keuangan-masyarakat>
- MNC Bank. (2023, November 22). Melihat tren layanan perbankan digital tahun 2024. MotionBank. <https://motionbank.id/melihat-tren-layanan-perbankan-digital-tahun-2024/>
- Nandhika, Y. P., & Fitriyani, V. (2024). Pertumbuhan dan peluang fintech di Indonesia. Kompaspedia.
- Neraca. (2024, January). Tantangan dan peluang fintech di 2024. Neraca.co.id. <https://www.neraca.co.id/article/196428/tantangan-dan-peluang-fintech-di-2024>
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389-406.
- Reskiyah, S. (2023, June 10). The digital economy landscape in Indonesia. ASEAN-Australia Strategic Youth Partnership (AASYP). <https://aasyp.org/2023/06/10/the-digital-economy-landscape-in-indonesia/>
- Santoso, B. (2020). Laporan kajian kesenjangan sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply) terhadap pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
- Setkab.go.id. (2023). President Jokowi: Indonesia's digital economy has potential to reach Rp5,800 trillion by 2030. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Simanjuntak, M. H. (2024, March). OJK: Industri fintech dukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Antara News.

Surachman, A. E., Rasyid, S. Z., Tarmizi, S. P. D., Anantadjaya, S., Nagari, A., Pekerti, R. D., Yuliasuti, H., Nolchi, Y., Languyu, R., Devila, M. A., Subhi, M. A., Munir, D., Anggraini, T., Tadjie, G. S., Basmar, E., Ayuandiani, W., Sutanti, M., & Mukhlisiah, R. (2024). *Manajemen Keuangan Di Era Digital*. PT Sada Kurnia Pustaka.
https://repository.ipmi.ac.id/2498/1/Ebook_Manajemen%20Keuangan%20Di%20Era%20Digital.pdf

Syaagatha, A. (2024, December 6). Mengatasi kesenjangan akses keuangan: Membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/anitasyaagatha4479/6603fae8de948f1a0f69f315/mengatasi-kesenjangan-akses-keuangan-membuka-peluang-ekonomi-bagi-masyarakat>

Voi.id. (2024, November 14). Daya saing digital Indonesia naik dua peringkat, masih kalah dari 3 negara Asia Tenggara lain. Voi.id.